



Membangun Politik Yang Berakhlak: Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Sistem Demokrasi

Lira Sopi Ema¹, Erwin Permana², Suatang³, Kurniati Kurniati⁴

Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah dan Hukum,

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: 10200122076@Uin-alauddin.ac.id¹, 10200122042@Uin-alauddin.ac.id²,
10200122061@Uin-alauddin.ac.id³

Abstract. *The main problem in current politics is the inability of politicians, policy makers and leaders who should represent society to fulfill their expectations. This research aims to understand how Islamic values can be integrated into a democratic system and find ways to build moral politics based on these principles. Islam in the context of democracy. This research applies a qualitative approach using a literature study method, namely by searching for many references regarding "Building Politics with Morals: Integration of Islamic Values in a Democratic System" sourced from books and journals as well as triangulation validation techniques. The findings show that democracy is in the hands of the people and politics as policy makers and running the government. To integrate Islamic values in democracy, the concepts of equality, freedom of opinion, justice, deliberation and responsibility are applied. The role of Islamic political ethics in building moral politics is to make religion the basis of ethics, to form the ability to be critical and rational and to create leaders who are fair, wise, trustworthy and competent.*

Keywords : *Integration, Islamic values, Democracy*

Abstrak. Masalah pokok dalam politik saat ini adalah ketidakmampuan politisi, pembuat kebijakan, dan pemimpin yang seharusnya mewakili masyarakat untuk memenuhi harapan mereka. Penelitian ini bertujuan memahami nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalam system demokrasi dan mencari cara untuk membangun politik yang berakhlak berdasarkan prinsip-prinsip Islam dalam konteks demokrasi. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, yaitu dengan mencari banyak referensi mengenai "Membangun Politik yang Berakhlak: Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Sistem Demokrasi" yang bersumber dari buku dan jurnal serta teknik validasi triangulasi. Hasil temuan menunjukkan bahwa demokrasi berada di tangan rakyat dan politik sebagai pembuat kebijakan dan menjalankan pemerintahan. Untuk memadukan nilai-nilai Islam dalam demokrasi yaitu diterapkan konsep kesetaraan, kebebasan berpendapat, keadilan, musyawarah dan bertanggungjawab. Adapun peran etika politik Islam dalam membangun politik berakhlak yaitu menjadikan agama landasan etika, membentuk kemampuan bersikap kritis dan rasional dan menciptakan pemimpin yang adil, bijaksana, amanah serta berkompetensi.

Kata kunci : Integrasi, nilai-nilai Islam, Demokrasi

PENDAHULUAN

Etika memiliki peran sentral dalam kehidupan manusia, termasuk dalam politik. Dalam dinamika politik modern yang sering kali terpengaruh oleh praktik yang melanggar norma dan etika, pentingnya prinsip-prinsip etika politik semakin meningkat. Fiqh, sebagai ilmu yang mempelajari hukum Islam, memiliki potensi besar untuk memberikan panduan etika dalam konteks politik. Dalam tradisi Islam, politik bukan hanya tentang perebutan dan penggunaan kekuasaan, tetapi juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika. Fiqh, sebagai bagian dari tradisi Islam, memberikan berbagai panduan etika politik yang relevan untuk politik modern. (Tanjung & Tanjung, 2023) Hubungan antara agama dan politik sangat unik, menarik, dan hampir lucu. Keduanya kadang dimulai dengan perseteruan dan diakhiri dengan

keharmonisan. Sejarah telah mencatat dengan jelas bahwa tokoh, komunitas, dan institusi keagamaan dapat berperan sebagai penjaga moral masyarakat sekaligus sebagai pengkritik kekuasaan yang tajam. (M. Zaki, 2019)

Islam sebagai agama dianggap memiliki konsep politik yang sangat jelas. Oleh karena itu, demokrasi yang diperkenalkan oleh Barat sebenarnya sudah diatur dalam ajaran Islam. (Solehuddin Harahap, 2022) Dalam Islam, kepemimpinan bukan hanya tentang mencapai tujuan yang diinginkan, tetapi juga tentang keseluruhan proses mencapai tujuan tersebut, dengan memperhatikan kepatuhan terhadap syariat dan kehalalan cara yang digunakan. Kepemimpinan dalam Islam mengacu pada memimpin semua aspek kehidupan dengan panduan dari Al-Qur'an dan Hadits, menunjukkan bahwa perbedaan antara kepemimpinan aliran Barat dan Islam adalah dalam cara mengarahkan dan mempengaruhi orang lain untuk kebaikan sesuai dengan ridho Allah SWT. (Lailatul Mufidah, 2021) Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa "agama Islam tidak dapat berdiri dan bertahan tanpa kekuasaan, dan kekuasaan tidak dapat bertahan lama tanpa dukungan agama". Hal ini menunjukkan bahwa agama tidak dapat dipisahkan dari politik, termasuk kekuasaan yang diperoleh melalui jabatan kepemimpinan. (Andiko, n.d.)

Hal ini terlihat dari para elit politik atau relawan dari kedua kubu yang bersaing dengan menggunakan berbagai cara untuk mempengaruhi pemilih. Cara-cara yang banyak ditampilkan melalui media arus utama ini sangat mengkhawatirkan, karena dapat mengarah pada perpecahan bangsa atau setidaknya menyebabkan disintegrasi nasional. Jika dibiarkan terus-menerus, kejadian semacam ini mungkin bisa terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, dalam berdemokrasi untuk menentukan pilihan haruslah didasarkan pada nilai-nilai etika dan moral sebagai fondasi utama. Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi berkeadaban yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sebagai negara hukum, Indonesia sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dan moralitas. Etika dan moralitas merupakan sistem nilai yang dituangkan dalam hukum/norma, yang kemudian menjadi aturan untuk mengatur kehidupan manusia dalam berinteraksi sosial (Hermanto, 2019).

Dari latar belakang permasalahan dipahami bahwa politik dan demokrasi serta perkembangannya tidak dapat lepas dari nilai-nilai dasar hukum Islam. Karena dalam hukum Islam terdapat tata nilai dan etika dalam melakukan pertumbuhan dan perkembangan yang dibutuhkan dan sesuai kondisi masyarakat. Maka dari itu peneliti akan berfokus pada "Membangun Politik yang Berakhlak: Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Sistem Demokrasi". Penelitian ini bertujuan memahami nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalam system demokrasi dan mencari cara untuk membangun politik yang berakhlak berdasarkan prinsip-

prinsip Islam dalam konteks demokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan berbagai referensi tentang "Membangun Politik yang Berakhlak: Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Sistem Demokrasi" yang berasal dari buku dan jurnal. Penelitian ini diawali dengan mengumpulkan berbagai referensi tentang Etika Politik Islam untuk menyusun poin-poin utama dari setiap konsep yang disampaikan. Dalam validasi data, penulis menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari studi referensi dapat dikonfirmasi kebenarannya dengan memeriksa berbagai sumber data. Selanjutnya, data tersebut harus diverifikasi melalui minimal dua sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Politik dan Demokrasi

Dalam bahasa Arab, politik disebut siyasah yang mencakup pengaturan, pengelolaan, pemerintahan, serta pembuatan kebijakan. Istilah ini menunjukkan bahwa tujuan siyasah adalah mengelola dan merancang kebijakan politis untuk mencapai tujuan tertentu. Diskusi tentang hal ini dalam konteks hukum Islam disebut fiqh siyasah. (Solehuddin Harahap, 2022). Secara esensial, politik merujuk pada perilaku manusia, termasuk kegiatan, aktivitas, dan sikap, yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mempertahankan struktur masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan bukanlah inti dari politik, meskipun penting di dalamnya untuk menjalankan kebijakan dalam kehidupan masyarakat. (Achmad Irwan Hamzani and Havis Aravik, 2021).

Rahman berpendapat bahwa dalam Islam, ditegaskan pentingnya menyelesaikan masalah-masalah umat melalui musyawarah atau konstitusi yang saling menguntungkan. Musyawarah adalah bagian dari perintah Allah kepada umat Islam untuk mengatasi permasalahan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. (Riky Yudha Permana, 2020). Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang menggabungkan "*demos*" (rakyat) dan "*kratos*" atau "*cratein*" (pemerintahan), yang artinya adalah pemerintahan yang dilakukan oleh, untuk, dan dari rakyat. Awalnya digunakan di Athena sekitar abad ke-5 M. Presiden AS ke-16, Abraham Lincoln, menggambarkan demokrasi sebagai pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Banyak orang dan negara mengakui demokrasi sebagai sistem nilai kemanusiaan yang menjanjikan masa depan yang lebih baik bagi umat

manusia.(’Afifah, 2020).

Demokrasi merupakan aspek dari sistem politik dan pemerintahan yang mengacu pada pemerintahan oleh rakyat, atau keyakinan bahwa dalam sebuah sistem pemerintahan negara, rakyat memiliki kapasitas untuk memimpin masyarakat. Konsep ini pertama kali muncul pada abad kelima sebelum masehi di Athena kuno, terutama di kalangan penduduk Athena.(Taufik & Abu, 2020). Dalam negara demokrasi, hubungan antara penguasa dan rakyat tidak didasarkan pada kekuasaan semata, tetapi ditentukan oleh hukum yang menghormati hak asasi manusia (HAM).(Zainuddin, 2019) Demokrasi mengajarkan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat. Dengan pemahaman ini, rakyat akan menciptakan aturan yang menguntungkan dan menjaga hak-hak mereka. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan peraturan bersama yang mendukung dan menjadi fondasi dalam tatanan negara untuk menjamin serta melindungi hak-hak rakyat.(Noviati, 2016).

Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, prinsip musyawarah ditekankan sebagai dasar bagi Syura dalam Islam. Perbedaan mendasar antara Syura dalam Islam dan demokrasi Barat adalah bahwa Syura melibatkan partisipasi semua orang dalam pemerintahan dan mengacu pada Al-Quran dan teladan Nabi Muhammad, sementara dalam demokrasi Barat, keputusan diambil oleh rakyat atau perwakilannya tanpa mengacu pada ajaran agama. Meskipun demikian, demokrasi yang berakar pada nilai-nilai agama tidak bertentangan dengan Islam karena Al-Quran memberikan dasar moral untuk membangun sistem demokrasi.(Atmaja et al., 2023).

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa, kita melihat bahwa politik dalam konteks bahasa Arab dan Islam mengacu pada peraturan, pengelolaan, dan pembuatan kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam fiqh Siyasah juga juga membahas diskusi tentang politik dalam hukum Islam, dengan pentingnya musyawarah sebagai bagian dari penyelesaian umat. Sedangkan Demokrasi adalah pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat, meskipun demokrasi tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, prinsip musyawarah diakui sebagai dasar Syura dalam Islam, yang membedakannya dari demokrasi Barat dalam cara pengambilan keputusan dan referensi ajaran agama.

Nilai-nilai Islam dalam Demokrasi

Demokrasi adalah kebutuhan zaman dan menjadi elemen utama yang membentuk manusia saat ini. Sebagai anggota masyarakat, manusia memiliki hak-hak demokrasi, terutama hak untuk memilih, berpikir, berekspresi, mengeluarkan pendapat, berkumpul, berorganisasi, mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama. Rakyat memegang kekuasaan tertinggi, membuat dan menentukan keputusan serta kebijakan dalam

penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan.(Fadli Syahdiyono, 2022) Pemerintahan yang dipilih oleh rakyat dan bekerja demi kepentingan rakyat diwujudkan melalui partai politik sebagai representasi aktor kolektif. Partisipasi masyarakat menjadi satu-satunya cara untuk melegitimasi keputusan mereka. Sebagai sekelompok orang yang bekerja bersama, partai politik memfasilitasi pembentukan visi bersama tentang kekuasaan atas nama rakyat.(Melati et al., 2023)

Demokrasi di Indonesia telah berkembang dengan berbagai dinamika, terutama tantangan-tantangan yang dihadapi belakangan ini. Tantangan utama datang dari berbagai kelompok sosial dan keagamaan yang menolak konsep demokrasi serta kebijakan-kebijakan turunannya. Sementara itu, kelompok lain seperti kelompok kiri yang tumbuh dalam gerakan politik radikal (seperti kelompok Partai Rakyat Demokratik dan variannya) jelas mendukung demokrasi dan hak asasi manusia serta tidak menggunakan pendekatan agama.(Ulfiyyati Alifa et al., 2023)

Dalam Islam, tidak ada dikotomi antara agama, negara, hukum, demokrasi, dan politik. Berdasarkan penelitian Muhammad Tahir Azhari dengan menggunakan teori lingkaran konsentris, komponen-komponen agama, hukum, dan negara yang digabungkan akan membentuk lingkaran konsentris, menciptakan suatu kesatuan yang erat dan saling berhubungan.(Zuharini, 2014) Islam dan politik saling terkait erat, dimana Islam memandang politik sebagai cara menjaga umat. Tanpa politik, kaum Muslimin tidak bebas menjalankan syariat, sementara politik tanpa Islam hanya akan mengejar kekuasaan duniawi. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Islam dalam politik di Indonesia diperlukan sebagai panduan dalam dinamika perpolitikan.(Lavan, 2021) Dari konteks masalahnya, dapat dipahami bahwa hubungan antara politik dan evolusi hukum Islam tidak dapat dipisahkan, karena hukum Islam bertujuan untuk membentuk sistem kehidupan yang selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang secara alami memerlukan penyesuaian regulasi yang sesuai dengan kondisi sosial yang disebut politik.(Kurniati, 2013). Islam sebagai panduan hidup manusia (*minhaj al-hayah*) tentu mengandung nilai-nilai penting dalam kehidupan. Mengenai demokrasi, ada beberapa nilai yang perlu ditonjolkan dalam kehidupan bernegara dan berdemokrasi, antara lain :

1. Al-Musawah, yaitu Sebuah konsep kesetaraan di antara individu dalam hal martabat, derajat, dan posisi mereka. Dalam Islam, tidak ada perbedaan antara manusia berdasarkan strata sosial, gender, atau ras, melainkan keunggulan seseorang diukur dari ketakwaannya kepada Allah.

2. Al-Hurriyah, yaitu Kalimat tersebut merumuskan gagasan bahwa kebebasan atau kemerdekaan manusia harus didasarkan pada pertanggungjawaban moral dan hukum, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Konsep ini menekankan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang mengakui martabat manusia sebagai ciptaan Allah yang dianugerahi kebebasan untuk memilih. Setiap individu memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri tanpa intervensi dari pihak lain. Dalam konteks Islam, prinsip ini juga diakui sebagai kesepakatan untuk mengakui ke-Tuhanan Allah.
3. Al-Ukhuwwah, yaitu menggambarkan ide tentang persaudaraan antar manusia berdasarkan kesetaraan mereka sebagai ciptaan Allah yang berasal dari tanah yang sama.
4. Al-Adalah, yaitu Konsep keadilan yang berfokus pada pemenuhan hak-hak manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.
5. Al-Syura, Musyawarah yaitu Setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam hal-hal publik yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
6. Al-Mas'Ulliyah/responsibility, yaitu Prinsip tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap pemegang kekuasaan perlu dipahami dengan baik. Kekuasaan merupakan sebuah amanah yang harus dijaga dengan hati-hati, bukan sesuatu yang hanya dinikmati. Bagi para penguasa, amanah ini memiliki dua makna: sebagai amanat dari Allah dan sebagai amanat dari rakyat. (Rohman, 2019)

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa, Demokrasi adalah kebutuhan zaman yang menjadi elemen utama pembentuk manusia saat ini, memberikan hak-hak seperti memilih, berpikir, dan berpendapat. Rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam negara dan pengawasan kebijakan. Islam dan politik saling terkait, dengan Islam sebagai panduan hidup yang memerlukan penerapan nilai-nilainya dalam politik. Hukum Islam yang berkembang sesuai kebutuhan masyarakat memerlukan penyesuaian regulasi melalui politik. Nilai-nilai Islam yang penting dalam demokrasi meliputi kesetaraan (al-Musawah), kebebasan dengan tanggung jawab (al-Hurriyah), persaudaraan (al-Ukhuwwah), keadilan (al-Adalah), musyawarah (al-Syura), dan tanggung jawab (al-Mas'Ulliyah), di mana kekuasaan adalah amanah dari Allah dan rakyat. Ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya relevan dalam ranah spiritual, tetapi juga dalam dinamika politik yang mengatur kehidupan masyarakat.

Peran Etika Politik Islam dalam Membangun Politik yang Berakhlak

Etika adalah disiplin ilmu yang mengeksplorasi konsep kebaikan dan keburukan, dengan mempertimbangkan tindakan manusia sejauh yang dapat dipahami oleh akal pikiran. Secara luas, etika merujuk pada sub- bidang filsafat yang membahas nilai-nilai dalam konteks

perilaku manusia, menentukan apakah tindakan itu tepat atau tidak, baik atau buruk. Dengan kata lain, etika merupakan cabang filsafat moral yang memberikan panduan tentang bagaimana seseorang seharusnya bertindak. (Sudarman, 2016). Etika dan moral memiliki peran penting dalam pemerintahan, karena dengan adanya etika, pemerintahan dapat berfungsi dengan lebih optimal. Para pejabat pemerintahan memiliki kesadaran moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan dapat terwujud. (Nurdin, 2017).

Marwah suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh etika politik dari para elit penguasa. Etika tersebut memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan individu untuk bersikap kritis dan rasional, karena membantu mereka mengembangkan pemikiran independen dan bertindak secara bertanggung jawab. Kajian etika politik cenderung lebih mendalam, abstrak, dan filosofis, sehingga menjadi seni kepemimpinan dan kekuasaan yang mengikuti hukum, peraturan yang berlaku, serta nilai-nilai sosial, tradisi, dan agama sebagai sumber nilai yang dapat meningkatkan martabat dan keberadaban suatu bangsa. (Ritaudin, 2014).

Etika Politik Islam memiliki karakteristik yang berbeda dari etika politik umum karena didasarkan pada wahyu Tuhan dan sunnah Rasul yang dianggap sakral. Interpretasi deduktif dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul menjadi suatu hal yang pasti dalam konteks ini. Sebaliknya, ketika muncul realitas sosial, legitimasi terhadap realitas tersebut harus jelas dalam kerangka Etika Politik Islam. Ini berarti bahwa realitas yang baik dapat diberi justifikasi jika sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam nash-nash tersebut, meskipun hasil aktualisasinya mungkin tidak selalu mengikuti nilai-nilai indoktrinasi. Oleh karena itu, epistemologi akhlak dalam Etika Politik Islam tidak dapat dipisahkan dari metode-metode pemahaman ajaran, terutama dalam konteks penerapan etika politik, di mana hampir semua metode pengambilan keputusan dalam syariat Islam dapat digunakan secara proporsional. (Dahlan, 2021).

Meskipun Al-Quran tidak secara jelas membahas evolusi sistem politik, kitab tersebut menekankan pentingnya dipercayakan kekuasaan politik kepada individu yang beriman dan berperilaku baik. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan politik sangat terkait dengan karakteristik tersebut. Selain itu, politik juga terhubung dengan konteks geografis dan historis, menggambarkan bahwa politik adalah bagian integral dari warisan budaya manusia dan sangat terkait dengan latar belakang sejarahnya. Politik merupakan aspek yang tak terpisahkan dari pemerintahan, memerlukan pemimpin yang dipercayai oleh masyarakat dan bertugas untuk kepentingan mereka. Politik melibatkan sistem dengan elemen-elemen yang saling terhubung dan saling mendukung. Selain itu, politik mencakup berbagai kegiatan dalam suatu negara

yang terkait dengan penetapan tujuan dan strategi untuk mencapainya.(Askana Fikriana & M. Kahfi Rezki, 2023)

Secara umum, etika politik yang diungkapkan dan dibangun oleh para pemikir Muslim tersebut sangatlah ideal dalam kehidupan berpolitik, meskipun ada beberapa pemikiran yang jika diterapkan di Indonesia negara demokrasi, bukan negara Islam tidak bisa dilaksanakan atau membutuhkan reinterpretasi ulang. Namun, syarat-syarat yang diajukan oleh mereka bagi seorang pemimpin, misalnya, sangat sulit untuk diwujudkan atau dimiliki oleh satu individu. Oleh karena itu, penulis setuju dengan pemikiran al-Farabi yang memberikan solusi agar kepemimpinan dipegang secara kolektif dengan mempertimbangkan kapabilitas masing-masing.(In'amuzzahidin, 2016)

Para pemimpin politik Islam adalah yang pertama dalam negara Islam yang menegakkan semua prinsip moral dan etika. Mereka menjadi teladan bagi masyarakat dalam segala hal, mulai dari pemikiran hingga tindakan. Hal ini merupakan fokus utama yang disampaikan oleh para ulama Islam tentang kepemimpinan Islam, seperti yang dijelaskan oleh al-Mawardi, Ibn Jamaah, Ibn Abi al-Rabi', Ibn Taimiyyah, dan ulama lainnya. Dari sana, mereka mendorong program moral dan etika ke dalam masyarakat. Melalui sistem politik Islam, mereka dapat membersihkan pemimpin dari perilaku buruk seperti korupsi, politik uang, skandal seks, penyalahgunaan kepercayaan, penipuan, dan penyelewengan dana publik. Ini membawa berkah besar bagi rakyat, karena mereka dapat membangun dengan baik tanpa adanya penyalahgunaan. Oleh karena itu, dikatakan bahwa masyarakat yang bersih dan beretika akan muncul jika pemimpin mereka juga bersih dan beretika. Namun, pemimpin yang tidak beretika hanya akan menciptakan masyarakat dengan pemikiran dan perilaku yang rusak.(Shukeri Mohamad, 2017) Karena pada dasarnya, tidak memenuhi janji kampanye akan menimbulkan masalah baik secara filosofis, hukum, maupun sosial.(Sholeh, 2021) Negara juga hendaknya mengadakan pendidikan politik kepada calon pemimpin sebagai ilmu berkelanjutan untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang sistem politik, nilai-nilai demokrasi, partisipasi warga negara, dan kesadaran politik.(Rahmayanti et al., 2024). Seorang pemimpin atau politisi yang memegang kekuasaan dalam suatu negara harus memiliki lima prinsip etika politik Islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

1. Agama sebagai dasar etika kepemimpinan

Dapat dimengerti bahwa menurutnya, agama ialah elemen yang mampu melindungi manusia dari tindakan atau niat yang menyimpang. Selain itu, menjaga agama (*hifzu al-din*) adalah salah satu tanggung jawab utama seorang pemimpin. Karena itu, Seorang pemimpin dipilih untuk menegakkan perintah-perintah, prinsip-prinsip, dan hukum-hukum Ilahi.

Kebijakan politik yang diambil oleh pemimpin negara atau pejabat publik lainnya harus berdasarkan ajaran Allah SWT. Dengan kata lain, etika kebijakan yang dijalankan oleh pemimpin atau pejabat publik harus berasal dari tauhid. Dari tauhid ini, akan muncul ketaatan dan ketakwaan yang pada akhirnya menghasilkan rasa takut kepada Allah, sehingga kebijakan politik yang dilaksanakan tidak semena-mena dan memberikan manfaat yang sesuai bagi masyarakat umum.

2. Amanat dalam berkuasa

Ibnu Taimiyah juga mengulas prinsip amanat yang berlandaskan agama dalam karyanya yang terkenal, "*al-Siyâsah al-Syar'iyah*". Dalam karya tersebut, dia mengaitkan pembahasan mengenai "Menunaikan Amanat" (*Adâ'u al-Amânâh*) dengan QS. al-Nisa (4) ayat 58. Menurut Ibnu Taimiyah, dalam menunaikan amanat, terdapat dua aspek krusial: pertama, yang berhubungan dengan jabatan dan proses penunjukannya (*al-walâ'yât*), dan kedua, yang berkaitan dengan perbendaharaan atau kekayaan (*al-amwâl*).

3. Bijaksana dan adil dalam penerapan hukum

Dapat dipahami bahwa Islam sangat menekankan pentingnya akhlak yang luhur dalam setiap individu. Akhlak luhur yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau pejabat politik termasuk kebijaksanaan dan keadilan. Kebijaksanaan seorang pemimpin dapat meningkatkan kredibilitasnya, sehingga orang-orang akan menghormatinya. Selain itu, keadilan yang diterapkan oleh seorang pemimpin akan menciptakan keamanan dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemimpin dan pejabat politik yang memiliki etika politik yang adil dan bijaksana sangat penting untuk menciptakan negara yang stabil dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

4. Kompeten dan pintar dalam bidangnya

Ibnu Khaldun menyarankan empat prinsip bagi individu yang menduduki jabatan penting: kecerdasan, keadilan, kompetensi, serta kesehatan fisik dan mental. Kutipan tersebut merangkum pandangan sebelumnya bahwa di samping harus sehat secara fisik dan mental, seorang pemimpin dan pejabat politik juga perlu memiliki kecerdasan intelektual dan pengetahuan yang mendalam, serta keahlian dalam bidangnya. Dengan demikian, mereka dapat bekerja secara optimal, sehingga dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab mereka bisa membawa manfaat terhadap masyarakat luas.

5. Musyawarah

Dalam konteks politik Islam, musyawarah dianggap sebagai suatu kewajiban yang didasarkan pada perintah Allah kepada Rasul-Nya untuk melakukan musyawarah, yang tentunya lebih ditekankan lagi bagi para pengikut Rasul. Karena itu, apabila seorang pemimpin

bersikap otoriter dan feodal, maka pengikut ataupun rakyatnya mungkin akan menjauh darinya. Jelas bahwa konsep musyawarah dalam Islam bertujuan untuk meminimalisir perselisihan. (Syariah & Ilmu, n.d.)

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa, Etika dan moral memainkan peran penting dalam pemerintahan yang optimal, di mana para pejabat bertindak dengan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Al-Quran menekankan pentingnya kekuasaan politik dipercayakan kepada individu yang beriman dan berperilaku baik, mencerminkan hubungan erat antara politik dengan konteks historis dan budaya. Meskipun pemikiran etika politik dari para pemikir Muslim ideal, penerapannya di negara demokrasi seperti Indonesia bisa menantang dan memerlukan reinterpretasi. Solusi al-Farabi mengenai kepemimpinan kolektif berdasarkan kapabilitas individu dianggap realistis. Pemimpin politik Islam yang etis menjadi teladan bagi masyarakat, menghindari perilaku buruk dan korupsi, sehingga menciptakan masyarakat yang bersih dan beretika. Sebaliknya, pemimpin yang tidak beretika akan merusak masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam membangun politik yang berakhlak dengan Integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem Demokrasi tentunya kita harus mengetahui pengertian dari politik dan demokrasi. Politik adalah peraturan dan pembuatan kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan demokrasi adalah aspek dari pemerintahan di mana rakyat yang berperan penting karena kekuasaan pemerintah oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk memadukan Nilai-nilai Islam dalam Demokrasi dapat dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan demokrasi, yaitu: kesetaraan posisi dan martabat antara individu, memberi kebebasan kepada individu dengan tetap adanya pertanggungjawaban, menjalin silaturahmi untuk memperkuat persaudaraan sesama manusia, memutuskan segala sesuatu dengan adil tanpa berat sebelah, memberikan kesempatan setiap individu untuk ikut berpendapat sebagai anggota masyarakat, dan amanah dalam menjalankan tugas yang diberikan dan bertanggungjawab atas segala tindakan. Dengan diterapkannya nilai-nilai Islam dalam demokrasi akan membentuk sistem kehidupan yang berkembang serta menjadi panduan dalam dinamika perpolitikan. Etika politik sangat berperan penting dalam pemerintahan ataupun politik, Adapun peran Etika Politik Islam dalam membangun politik yang berakhlak, yaitu agama dijadikan patokan etika seorang pemimpin, dalam memimpin masyarakat harus memegang prinsip amanat, pemimpin harus ahli dalam bidang tersebut serta pandai dalam membuat kebijakan, dan musyawarah dijadikan sebuah keharusan sebagai tanda bahwa adanya keterbukaan dan kebebasan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Peran Etika Politik Islam dalam politik tentunya

jika terwujud dengan benar sudah pasti akan membangun politik yang berakhlak dalam sebuah negara.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Afifah, F. N. (2020). Demokrasi dalam Al-Qur'an dan Implementasi Demokrasi di Indonesia. *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 10(1), 1–24. <https://doi.org/10.36781/kaca.v10i1.3060>
- Andiko, T. (n.d.). *Upaya meraih jabatan pemimpin Perspektif Hadis Ahkam*. 25–36.
- Asep Bambang Hermanto. (2019). *Etika Berdemokrasi Pancasila Dalam Konstestasi Politik Di Era Digitalisasi*. https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/01/2019.01.23_PLAN-NACIONAL-DE-CANCER_web.pdf
- Askana Fikriana, & M. Kahfi Rezki. (2023). Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), 235–248. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.657>
- Atmaja, H. D. S., Nugroho, W., Oleh, D., & Ardiyati, V. (2023). *Hakikat Demokrasi Dalam Pandangan Islam*. 12001091.
- Dahlan, D. (2021). Etika Politik Dalam Islam (Konstruksi Dan Perspektif). *Menara Ilmu*, 15(1), 42–50. <https://doi.org/10.31869/mi.v15i1.2389>
- Fadli Syahdiyono. (2022). Sistem Demokrasi Indonesia Menurut Prespektif Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 1–20.
- Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2021). *Asal Usul Kajian Ketatanegaraan*. www.penerbitnem.online
- Harahap, S. (2022). Siyasah Syari'iyah dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 112–127. <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/download/381/256>
- In'amuzzahidin, M. (2016). Etika Politik Dalam Islam. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2(2), 89. <https://doi.org/10.21580/wa.v2i2.382>
- Kurniati. (2013). Perkembangan Sosial Politik Dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam. *Al-Fikr*, 17(1), 176–189. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/download/2276/2209>
- Lailatul Mufidah, K. T. (2021). *Karakteristik Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*. 7(3), 6.
- Lavan, Y. O. (2021). Implementation of Islamic Values in Indonesian Political Dynamics. *Intelegensia : Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 53–66. <https://doi.org/10.34001/intelegensia.v9i1.2042>
- Melati, S., Putri, I., Hasanah, U., Hasyim, S., & Maylafaiza, H. (2023). *PERSPEKTIF FIQH SIYASAH Pendahuluan*. 01(01), 14–27.
- Noviati, C. E. (2016). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333. <https://doi.org/10.31078/jk1027>
- NURDIN, M. S. I. (2017). *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=MF49DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA21>

1&dq=etika+birokrasi+dalam+pelayanan+publik&ots=sKKjTbq011&sig=oj11-9nbJsa1zsnIDMS8QFLk6ls%0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/42/13/ebook_BUKU_ETIKA_PEMERINTAHAN.pdf

- Permana, R. Y. (2020). Konsep Politik Islam Menurut Fazlur Rahman. *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 3(2), 35–54. <https://doi.org/10.15575/jaqfi.v3i2.9566>
- Rahmayanti, M., Khozin, K., & Nurhakim, M. (2024). Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pendidikan Politik. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 8(1), 260. <https://doi.org/10.31604/jim.v8i1.2024.260-264>
- Ritaudin, M. S. (2014). Wawasan Etika Politik, Membangun Sikap Kritis dan Rasional Politik Bangsa. *Jurnal TAPIS*, 10(2), 12–32.
- Rohman, A. N. (2019). Internalisasi Nilai-Nilai Islam Dalam Praksis Demokrasi Di Indonesia. *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 2(1–2), 86–97. <https://doi.org/10.47313/jkik.v2i1-2.487>
- Sholeh, M. A. N. (2021). Kompetensi Dan Kedudukan Janji Bagi Pemimpin Publik Dalam Prespektif Hukum Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(2), 345–356. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.19641>
- Shukeri Mohamad. (2017). Pembentukan Masyarakat Berakhlak Mengikuti Politik Islam. *Jurnal Usuluddin, September 1997*, 145–174.
- Sudarman, P. (2016). Membangun Komunikasi Politik yang Etis. *Prolistik*, 1(1), 33–46. <http://103.66.199.204/index.php/ProListik/article/view/132>
- Syariah, K. B., & Ilmu, G. (n.d.). *Prinsip Etika Politik Pemimpin Dalam Islam. september 2016*, 1–6.
- Tanjung, I. U., & Tanjung, D. (2023). Etika Politik Dalam Fiqh Siyasah: Studi Tentang Prinsip Akhlak Dalam Politik Menurut Perspektif Fiqh. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 2(3), 242–248.
- Taufik, M., & Abu, A. (2020). Islam Dan Demokrasi. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.24239/moderasi.voll.iss1.1>
- Ulfyyati Alifa, Muhamad Ridho, Barri Mulki fathur, & Akbari Ilham Sultan. (2023). Demokrasi: Tinjauan Terhadap Konsep, Tantangan, DanProspek Masa Depan. *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1(4), 435–444. <https://www.adshr.org/index.php/vo/article/view/48>
- Zainuddin. (2019). Islam dan Demokrasi. *Aqlania*, 10(1), 63. <https://doi.org/10.32678/aqlania.v10i01.2109>
- Zaki, M. (2019). Potret Buram Politik Islam Indonesia. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(2), 114–128. <https://doi.org/10.20414/politea.v1i2.816>
- Zuharini. (2014). Islam: Negara, Demokrasi, Hukum Dan Politik. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 29–58.